

RINGKASAN

Indikator penilaian memperhatikan pengelolaan ADD dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Hasil evaluasi pengelolaan ADD di Kecamatan Sapuran yang relatif beragam (di satu kecamatan terdapat tiga desa yang memiliki bobot tertinggi, terendah dan sedang), menjadi fenomena tersendiri. Di Kecamatan Sapuran Desa Ngadikerso menduduki peringkat kedua terbaik dalam pengelolaan ADD se-Kabupaten Wonosobo, sedangkan desa lainnya di Kecamatan Sapuran dalam peringkat menengah dan bawah. Dengan data ini terlihat bahwa pengelolaan ADD di tiap desa pada Kecamatan Sapuran relatif dinamis, padahal di tingkat kecamatan sudah melakukan pendampingan sama untuk seluruh desa, sehingga penelitian difokuskan di Desa Ngadikerso yang mempunyai kelebihan dan pengelolaan ADD sehingga seringkali mendapatkan *reward*. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan ADD di Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran tahun 2012.

Penelitian fokus pada teori manajemen pengelolaan ADD pada empat aspek utama yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan ADD. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif. Informan penelitian ini terdiri dari unsur pemerintah desa, BPD dan masyarakat serta pegawai kecamatan /kabupaten. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif.

Hasil penelitian diketahui proses perencanaan ADD telah dilakukan dari tingkat bawah sampai dengan desa, yaitu dimulai dari musrenbangdus dan musrenbangdes. Kegiatan perencanaan masih didominasi pada kegiatan fisik, mengingat kondisi desa relatif rusak dan membutuhkan percepatan perbaikan. Perencanaan ADD yang sudah dibuat ditindaklanjuti dengan pembentukan tim pelaksana ADD. Tim ini dibentuk melalui musrenbangdes yang diisi oleh tokoh pemerintah desa, BPD dan tokoh lembaga tingkat desa lainnya. Tim inilah yang nantinya akan mengelola seluruh dana ADD. Pelaksanaan ADD secara umum sesuai rencana, namun demikian kemampuan SDM pengelola terkadang sulit menyelesaikan administrasi tepat waktu. Pelaksanaan ADD didukung oleh masyarakat sekitar, terutama membantu tenaga dan bantuan dana. Fungsi pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan dengan tiga elemen, yaitu tim pengelola itu sendiri, pengawasan dari kecamatan/kabupaten dan juga masyarakat. Sistem pengawasan seringkali hanya terpusat pada laporan kegiatan secara tertulis, dan kurang diimbangi dengan pemeriksaan teknis secara faktual.

Perencanaan partisipatif perlu terus ditekankan kepada semua komponen masyarakat, sehingga perencanaan ADD akan lebih optimal mulai dari tingkat bawah yang diteruskan pada tingkat desa. Rencana ADD perlu didukung dengan SDM yang handal, dengan harapan rencana ADD benar-benar sesuai kebutuhan sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Karena itulah pengorganisasian yang dilakukan oleh tim perlu didukung oleh semua komponen yang ada di desa, baik dalam merekrut tokoh masyarakat yang berkompeten untuk dilibatkan secara langsung dalam semua tahapan ADD. Kualitas SDM pelaksana yang relatif sedang menjadi permasalahan tersendiri. Pelaksanaan ADD yang harus diimbangi dengan pembuatan laporan perlu menjadi

perhatian tim pelaksana. Berkas laporan yang cukup banyak, seringkali menyulitkan tim untuk membuat laporan. Karenanya peran pendamping perlu diintensifkan lagi, terutama pada saat kegiatan sudah mulai dilaksanakan sampai dengan kegiatan selesai, sehingga diharapkan pelaksana dapat terus belajar guna efektivitas pengelolaan ADD di masa mendatang. Pengelolaan dana publik perlu diimbangi dengan akuntabilitas sehingga dapat diketahui oleh masyarakat desa. Karenanya perkembangan dana ADD hendaknya dilaporkan secara periodik secara konsisten, sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan secara optimal terkait dengan realisasi dana serta kegiatan yang telah dilaksanakan. Karena itulah BPD dan masyarakat hendaknya lebih aktif dengan memperhatikan pelaksanaan dan kesesuaian rencana dengan realisasi sehingga hasil dari ADD akan lebih optimal.

Kata kunci : Pelaksanaan, Pengawasan, Pengorganisasian, Perencanaan.



SUMMARY

The attention to the management of allocation of village funds assessment indicators of planning, implementation, accountability and oversight. The results of the evaluation of the management of allocation of village funds in Sapuran District relatively diverse (in one district there are three villages that have the highest weight, low and medium), became a phenomenon in itself. In Ngadikerso Village Sapuran District ranked second best in the management of the district of Wonosobo allocation of village funds, on other villages in the Sapuran district the middle and lower rank. With this data it appears that the management of allocation of village funds in every village in the Sapuran District relatively dynamic, but at the district level have the same guidance for the entire village, so the research focused on the village of Ngadikerso which has advantages and management of allocation of village funds so often get a reward. This study aims to analyze the management of allocation of village funds in the Ngadikerso Village of Sapuran District 2012.

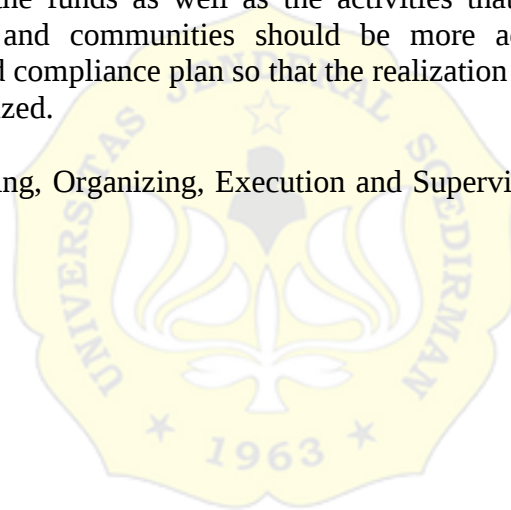
The research focused on the management theory of allocation of village funds on four main aspects: planning, organizing, implementation and monitoring of allocation of village funds. The method used in the descriptive qualitative research. Informants of this study consisted of elements of the village government, and society as well as employees BPD subdistrict / district. The data analysis technique used is interactive analysis.

The survey results revealed allocation of village funds planning process has been done from the bottom up to the village level, which starts from musrenbangdus and musrenbangdes. Planning activities are still predominantly on physical activity, given the condition of the village is relatively broken and in need of repair acceleration. Planning allocation of village funds that was made followed by the formation of the implementation team of allocation of village funds. The team was formed through musrenbangdes filled by the village government leaders, BPD and other village level institutions and figures. The team is what will be managing all funds allocation of village funds. Implementation of allocation of village funds in general according to plan, however, the ability of HR managers sometimes difficult to resolve in a timely administration. Implementation of allocation of village funds is supported by the surrounding community, especially helping personnel and funding. Oversight of the management of allocation of village funds is done with three elements, namely manager team itself, supervision of districts / counties and communities. Surveillance systems are often only focused on a report in writing activities, and less balanced with factual technical examination.

Participatory planning need to be emphasized to all components of society, so that the optimal planning of allocation of village funds will be starting from the bottom level which passed at the village level. Allocation of village funds plans need to be supported with reliable human resources, with the hope of actually allocation of village funds plan as necessary so that the benefit of the community. That is why the

organizing yang conducted by a team needs to be supported by all components that exist in the village, both in recruiting community leaders who are competent to be directly involved in all stages of allocation of village funds. The quality of human resources is becoming relatively implementing its own problems. Implementation of allocation of village funds which must be balanced with the need to preparing reports concern the implementation team. Files reports that quite a lot, often make it difficult for the team to make the reports. Therefore the role of companion needs to be intensified again, especially when the activity commenced until the activity is completed, which is expected to continue to learn to implementing effective management of allocation of village funds in the future. Management of public funds needs to be balanced with accountability so that it can be known by the villagers. Therefore development funds should be reported periodically allocation of village funds consistently, so that the oversight function may be optimized associated with the realization of the funds as well as the activities that have been implemented. That's why BPD and communities should be more active with regard to the implementation and compliance plan so that the realization of the allocation of village funds will be optimized.

Keywords : Planning, Organizing, Execution and Supervision of Allocation Village Funds



PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena atas kemudahan yang diberikan-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo)”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi pada Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Sepenuhnya penulis menyadari akan segala kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan, pengarahan dan bimbingannya kepada :

1. Dr. Slamet Rosyadi, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan dosen pembimbing, yang telah memberikan bantuan selama ini.
2. Dr. Ali Rokhman, M.Si. dan Drs. Simin, M.Si, selaku dosen pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dari awal hingga selesainya penyusunan tesis.
3. Prof. Dr. P. Israwan Setyoko, M.S., dan Dr. Sukarso, M.Si., selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan untuk kesempurnaan tesis ini.
4. Bupati Wonosobo, yang telah memberikan izin pendidikan dan penelitian kepada peneliti.
5. Camat Sapuran, yang telah memberikan ijin dan bantuan selama proses penelitian sehingga selesainya tesis ini.
6. Kepala Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran yang telah membantu selama proses penelitian
7. Perangkat desa, tokoh masyarakat dan perwakilan lembaga desa dan kecamatan, yang telah memberikan banyak bantuan selama proses pengumpulan data.
8. Keluargaku tercinta, atas motivasi dan kesabarannya selama ini hingga selesainya studi ini.

9. Semua pihak yang telah ikut membantu dan tidak dapat kami sebutkan semuanya dalam pembuatan tesis ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu, dan semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Purwokerto, Juli 2014

Penulis

